



## **LAPORAN**

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**TAHUN 2022**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN WONOSOBO**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Jalan T. Jogonegoro Nomor 13 Wonosobo Telp. (0286) 321339  
WONOSOBO 56314**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan plotting anggaran yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Wonosobo, Februari 2022

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara bertahap berupaya untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan terkait bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Tahun 16).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 Visi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2016-2021 adalah **TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA** serta misi Bupati Wonosobo, terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern. Dinas PPKBPPPA menjabarkan misi tersebut dengan sasaran Dinas Meningkatnya derajat Kesehatan reproduksi dan Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak

## **DAFTAR ISI**

### **Bab I Pendahuluan**

1. Latar Belakang
2. Gambaran Umum Organisasi
3. Uraian Tugas
4. Sumber Daya Perangkat Daerah
5. Fungsi Strategis Dinas
6. Sistematika Penulisan

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

1. Rencana Strategis dan Anggaran Dinas
2. Rencana Kinerja Tahun 2024

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

1. Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **Bab VIII Penutup**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

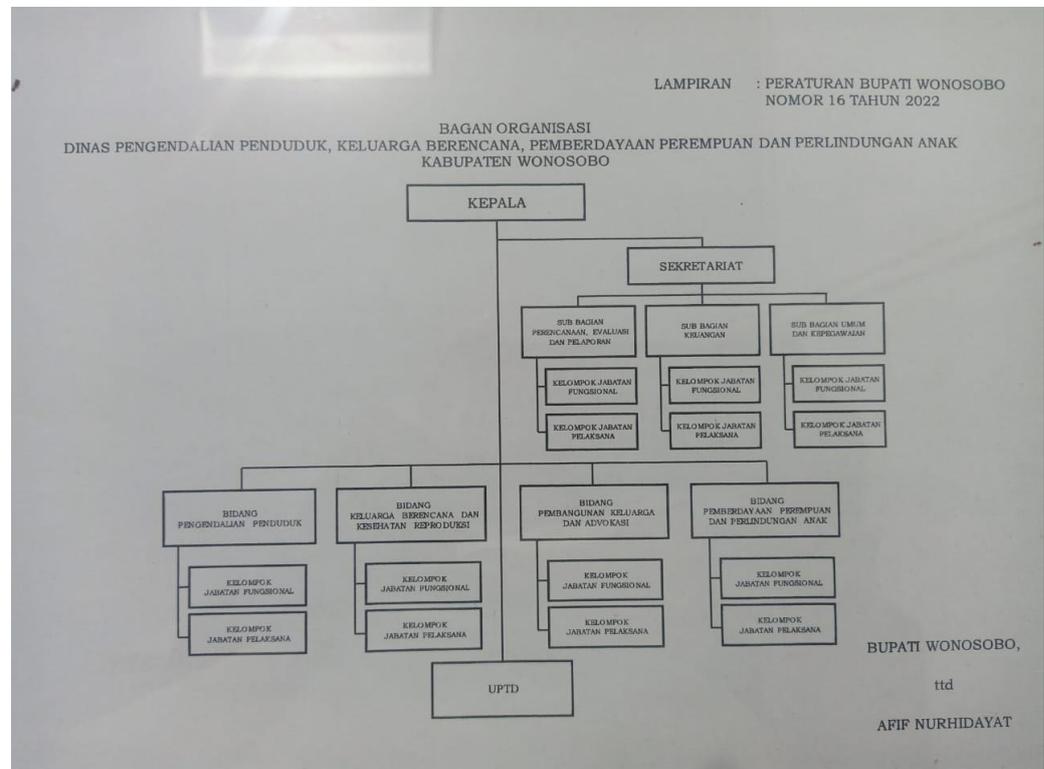
### **1. Latar Belakang**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo mengampu dua urusan yang pertama adalah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan yang kedua Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana tujuan utama adalah menciptakan keluarga yang berkualitas baik dari jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga yang ideal, sehingga tercipta anak berkualitas, meningkatnya peran perempuan didalam pembangunan serta menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **2. Gambaran Umum Organisasi**

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Tahun 16). Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat seorang Kepala, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Adapun Sekretariat terdiri dari Seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Bidang-bidang yang ada adalah : Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:



### 3. Uraian Tugas

#### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kesekretariatan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan tugas pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d) Kelompok Jabatan Fungsional dan
- e) Kelompok Jabatan Pelaksana

### **c. Bidang Pengendalian Penduduk**

Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penduduk.
- 2) Penyiapan, pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengendalian penduduk.
- 3) Pengkoordinasian kebijakan pengendalian penduduk.
- 4) Pengkajian, dan pengembangan kebijakan, strategi, dan program di sektor pengendalian penduduk.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk.

Bidang pengendalian penduduk terdiri dari :

- a) Kelompok Jabatan Fungsional dan
- b) Kelompok Jabatan Pelaksana

### **d. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

Tugas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan

fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional dan
- b) Kelompok Jabatan Pelaksana

#### **e. Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi**

Tugas Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi mempunyai merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan di bidang ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, advokasi, penyebarluasan dan penggerakan institusi.

Bidang Pembangunan Keluarga dan Advokasi terdiri dari:

- a) Kelompok Jabatan Fungsional dan
- b) Kelompok Jabatan Pelaksana

#### **f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 4) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 5) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
- a) Kelompok Jabatan Fungsional dan
  - b) Kelompok Jabatan Pelaksana

#### **4. Sumber Daya Perangkat Daerah**

##### **a. Sumberdaya Manusia**

Uraian pengantar mengenai Sumber Daya Manusia di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 41 pegawai yang terdiri dari 27 ASN dan 14 Non ASN, disamping itu di dinas terdapat 50 PKB dan PLKB yang merupakan ASN pusat yang ditempatkan di 15 kecamatan di kabupaten wonosobo, demikian dengan rincian pegawai dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2022**

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	TOTAL
1	SD sederajat	1	-	-	-	1	-	1
2	SMP	-	-	1	-	1	-	1
3	SMA sederajat	5	3	6	2	11	5	16

NO	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	TOTAL
4	D4	-	2	-	-		2	2
5	D 3	-	1	1	1	1	2	3
6	S1	2	7	3	-	4	7	11
7	S2	2	4	-	-	2	4	6
8	S3	-	-	-	-			
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>

Sumber: Data Kepegawaian 2022

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselon/Jabatan Fungsional Muda**  
**Tahun 2022**

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Esselon II-b	-	1	1
2	Esselon III-a	-	1	1
3	Esselon III-b	1	2	3
4	Esselon IV-a	-	2	2
5	Fungsional Muda	3	5	8
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Sumber: Data Kepegawaian 2021

**Tabel I.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022**

No	Golongan	DPPKBPPPA		Penyuluh KB		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Golongan IV/b		2		1	3
2	Golongan IV/a	3	2		1	6
3	Golongan III/d	2	6	1	6	15
4	Golongan III/c		1	1	4	6
5	Golongan III/b		1	4	3	8

No	Golongan	DPPKBPPPA		Penyuluh KB		Jumlah
		L	P	L	P	
6	Golongan III/a		2	4	9	15
7	Golongan II/d	3	1	8	5	17
8	Golongan II/c	2	1	3		6
9	Golongan II/b		1			1
10	Golongan II/a					
11	Golongan I/c	1				1
	TOTAL	11	17	21	29	83

Sumber: Data Kepegawaian 2022

**b. Sarana dan Prasarana**

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi barang bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di**  
**DPPKBPPPA Tahun 2022**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	2		2
2	Gedung Balai Penyuluhan	15		15
3	Gudang Alkon	1		1
4	Kendaraan Roda 4	10		10
5	Kendaraan roda 2	103		103
6	Meja Kursi Tamu	4		4
7	Meja Tulis	2		2
8	Kursi kerja pejabat	31		31
9	Kursi kerja ½ biro	30		30
10	Meja rapat	28		28
11	Kursi rapat tainles	210		210
12	Kursi rapat plastic	50		50
13	Rak arsip (kayu)	16		16
14	Almari arsip	3		3
15	Almari besi	2		2
16	Almari kaca	2		2
17	Almari kamera	1		1
18	Notebook	2		2
19	Laptop	6		6
20	Printer	3		3
21	Komputer	66		66
22	PC Komputer	11		11
23	Mesin ketik	2		2
24	Televisi	2		2
25	Pesawat telepon	2		2
26	Mesin fax	1		1
27	Genset	1		1
28	Kamera	3		3
29	Video Shooting (Handycam)	2		2
30	Filling Kabinet	15		15

31	Filling Besi	1		1
32	Filling Kayu	1		1
33	Mesin Ketik	15		15
34	Kursi Kerja	30		30
35	Kipas Angin	7		7
36	Kipas Angin Berdiri	5		5
37	Kipas Angin Duduk	3		3
38	Kompor Gas	3		3
39	Tabung Gas	2		2
40	Amplifier	1		1
41	Home Speaker	1		1
42	Microfone	3		3
43	Camera Digita	5		5
44	Camera Video	3		3
45	LCD Proyektor	25		25
46	Tape Recorder	15		15
47	DVD Player	1		1
48	Layar Film	1		1
49	Recorder Digital	1		1
50	Handy Talky	1		1
51	Obgin Bed Dunhil	4		4
52	Dispenser	2		2
53	Meja Komputer	2		2
54	Almari Almunium	1		1
55	Tenda	1		1
56	Potabel Generating set	1		1
57	White board	4		4
58	Papan nama instansi	1		1

Sumber: data DPPKBPPPA 2022

## **5. Fungsi Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi strategis yaitu mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga

menurunkan angka stunting dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Adapun tujuan dinas yang harus dipertanggungjawabkan yaitu:

1. menekan angka laju pertumbuhan penduduk.
2. Menurunkan rata rata anak yang dilahirkan pada perempuan usia subur (TFR)
3. Menurunkan rata rata usia kawin pertama perempuan.
4. meningkatkan cakupan Peserta KB aktif (CPR).
5. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan anak secara komprehensif.
6. meningkatkan indeks Pemberdayaan Gender.

## **6. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang Latar belakang, Gambaran Umum Organisasi, Uraian Tugas, Sumber daya, Fungsi Strategis Dinas dan Sistematika Penulisan

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Berisi Rencana Strategis dan Anggaran Dinas serta Rencana Kinerja Tahun 2024

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan capaian Kinerja Organisasi dan Relisasi Anggaran

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum capaian kinerja dan Strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. Rencana Strategi dan Anggaran Dinas**

Sebagaimana tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan Meningkatkan Kualitas Hidup, Kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan anak, perlu strategi yaitu :

1. Meningkatkan keluarga berkualitas
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender

Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Rencana Strategis DPPKBPPPA**  
**Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026**

Indikator Program	Target IKK	Target Resntra					Rencana Capaian					Rasio Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,75	58,00	58,06	59,06	59,68	59,71	58,00	58,06	59,06	59,68	59,71	100	100	100	100	100
Persentase anggaran responsif gender	135,40	72,37	81,58	95,03	108,49	121,94	72,37	81,58	95,03	108,49	121,94	100	100	100	100	100
% APBDes Responsif gender dan PUHA	59,67	36,88	40,96	45,64	50,31	54,99	36,88	40,96	45,64	50,31	54,99	100	100	100	100	100
% desa ramah anak	32,40	19,14	23,51	25,73	27,95	30,18	19,14	23,51	25,73	27,95	30,18	100	100	100	100	100
% Lembaga penyedia layanan PP dan PA	100,00	75	80	85,00	90,00	95,00	75	80	85,00	90,00	95,00	100	100	100	100	100

%lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	50,00	100	10	20	30	40	100	10	20	30	40	100	100	100	100	100
% pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
%perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	65,00	40	45	50,00	55,00	60,00	40	45	50,00	55,00	60,00	100	100	100	100	100
%pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	65,00	40	45	50,00	55,00	60,00	40	45	50,00	55,00	60,00	100	100	100	100	100
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	85,00	84,12	84,25	84,40	84,65	84,85	84,12	84,25	84,40	84,65	84,85	100	100	100	100	100

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	84,78	82,13	82,66	83,19	83,72	84,25	82,13	82,66	83,19	83,72	84,25	100	100	100	100	100
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	90,45	88,95	89,20	89,45	89,70	89,95	88,95	89,20	89,45	89,70	89,95	100	100	100	100	100
Rata-rata usia kawin pertama perempuan	21,00	18,00	18,20	18,40	18,60	18,80	18,00	18,20	18,40	18,60	18,80	100	100	100	100	100
Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	19,00	19,00	19,25	19,60	20,00	20,50	19,00	19,25	19,60	20,00	20,50	100	100	100	100	100
% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	2,48	2,53	2,52	2,51	2,50	2,49	2,53	2,52	2,51	2,50	2,49	100	100	100	100	100
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	30,00	27,55	28,00	28,50	29,00	29,50	27,55	28,00	28,50	29,00	29,50	100	100	100	100	100

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	48,00	31,33	34,75	38,17	41,58	45,00	31,33	34,75	38,17	41,58	45,00	100	100	100	100	100
Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19	46,44	66,59	58,33	55,36	52,38	49,41	66,59	58,33	55,36	52,38	49,41	100	100	100	100	100
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78,784	78,764	78,768	78,772	78,776	78,780	78,764	78,768	78,772	78,776	78,780	100	100	100	100	100
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	9,82	10,32	10,22	10,12	10,02	9,92	10,32	10,22	10,12	10,02	9,92	100	100	100	100	100
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38,61	38,11	38,21	38,31	38,41	38,51	38,11	38,21	38,31	38,41	38,51	100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah anak per	1,50	1,60	1,58	1,56	1,54	1,52	1,60	1,58	1,56	1,54	1,52	100	100	100	100	100

keluarga																
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Drop out KB	7,82	9,56	9,13	8,70	8,27	7,84	9,56	9,13	8,70	8,27	7,84	100	100	100	100	100
% Kebersertaan KB Pria	2,60	2,53	2,49	2,52	2,55	2,57	2,53	2,49	2,52	2,55	2,57	100	100	100	100	100

**Tabel 2.2**  
**Rencana Anggaran Pelayanan DPPKBPPA**  
**Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026**

Indikator Program	Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dengan anggaran						Rata Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Angg	Realisasi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	43.640.000	40.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000			100	100	100	100		
Persentase anggaran responsif gender	79.025.000	53.250.000	130.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000			100	100	100	100		
Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA	132.090.000	110.000.000	80.654.292	81.547.459	84.423.384	86.840.038			100	100	100	100		
		993.310.000						99.98						99.98
Persentase desa ramah anak	88.350.000	48.750.000	66.089.661	66.354.240	67.206.163	67.922.037		100	100	100	100	100		100

%Lembaga penyedia layanan PP dan PA	77.980.000	75.525.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000		98	100	100	100	100		98
Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif	485.185.000	365.000.000	298.022.744	298.361.149	299.450.785	300.366.412		99.15	100	100	100	100		99.15
Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	573.720.000	552.300.000	532.137.042	532.179.716	532.317.123	532.432.587		91	100	100	100	100		91
Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	75.000.000	75.000.000	62.428.994	62.685.891	63.513.080	64.208.171		100	100	100	100	100		100
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB														

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB														
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB														
Rata-rata usia kawin pertama perempuan														
Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan														
% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %														
Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa														

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri														
Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19														
	8.087.063. 000	5.760.160. 900	5.758.246. 748	3.553.209. 653	3.432.105. 365	3.457.564. 885		97	100	100	100	100		97
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49														
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)														

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
Drop out KB														
% Kebersertaan KB Pria														
	315.000.000	4.014.985.000	716.425.007	138.401.425	133.684.279	134.675.956	315.000.000	90	100	100	100	100		90
Rata-rata jumlah anak per keluarga	115.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			100	100	100	100		
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	257.000.000	290.710.000	261.210.000	261.210.000	261.210.000	261.210.000			100	100	100	100		
		384.373.000						90.80						90.80

## 1. Rencana Kinerja 2024

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	<b>Terwujudnya pelayanan Publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
		Nilai SAKIP	66,64
2	<b>Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender</b>	Indek Pemberdayaan Gender	47.80
		Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	48
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6,66
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	59,68
		Persentase anggaran responsif gender	100
		Persentase APBDes responsif gender	50,31
		Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	40
3	<b>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak</b>	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani secara komprehensif dan terselesaikan	100
		persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100,00
		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	55

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
	<b>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak</b>	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate	100
		Persentase Desa Ramah Anak	27,95
		Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100,00
		Persentase anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif	55
		Cakupan layanan konseling	0,19
		Cakupan lembaga layanan tingkat desa	35,09
4		<b>Meningkatnya Kualitas keluarga</b>	Total Fertility Rate (TFR)
	Laju Pertumbuhan Penduduk		0,42
	Rata-rata usia kawin pertama perempuan		18,60
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		78,31
	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1.54
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun		100,00
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		10,02
	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		38,41
	Drop out KB		8,70
	Kebersertaan KB pria		2,55
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		52,38

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84,65
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	83,72
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	89,70
		Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	2,49
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	72,34
		Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	29
		Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	20

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **1. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Di Kabupaten Wonosobo urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) serta dibantu oleh kecamatan dalam rangka pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.

##### **a. Alokasi Pendanaan**

Untuk mendukung urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar **Rp10.159.518.900,00**. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada tahun 2022 dapat terealisasi sebesar **Rp9.465.841.064,00** atau 91,54%. Capaian program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.1.1**  
**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	<b>Total Belanja</b>	<b>10.014.985.900,00</b>	<b>9.465.841.064,00</b>	<b>91,54</b>
1	Program Pengendalian Penduduk	384.373.000,00	349.026.806,00	90,80
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.760.160.900,00	5.587.579.258,00	97
3	Program Pemberdayaa n dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	4.064.985.000,00	3.531.185.000,00	86,87

*Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2022*

**b. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**1) Program Pengendalian Penduduk**

Program Pengendalian Penduduk tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 384.373.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.349.026.806,00 atau 90,80 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, terdiri dari kegiatan

**a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah**

### **Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Kegiatan ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.123.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.109.063.000,- atau 88.55%

Kegiatan ini dilakukan melalui Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota, berupa penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Wonosobo periode 2021-2024.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan, untuk memberikan ketersediaan data dan informasi terkait pengetahuan masyarakat tentang kependudukan.

Sub Kegiatan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, jalur Non formal dan informal. Dilaksanakan untuk memberikan informasi/pengetahuan tentang kependudukan di tingkat sekolah/remaja melalui sosialisasi dan lomba tentang pengetahuan kependudukan. Pada tahun 2022 baru dilaksanakan di 100 SLTP dan SLTA yang ada di Kabupaten Wonoosbo

### **b. Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.261.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp.239.963.806,- atau 91.87 %.

Melalui Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, dilaksanakan pengadaan aplikasi untuk pengolahan data kependudukan serta pemberian pelatihan aplikasi SIKKB bagi Kader PPKBD, PLKB dan dinas sehingga tersedia data dan informasi kependudukan yang up to date, dan valid yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan kependudukan

Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi, dilaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui pelatihan Inovasi SI KKB tingkat kecamatan dilaksanakan untuk memaksimalkan pemanfaatan data PK yang sesuai dengan realita di ikuti oleh 52 kader pendata, 37 petugas pengelola rumah data dan 52 PLKB dengan narasumber

Fungsional Penata KKB, Kabid dalduk dan narasumber Si KKB.

serta Sub Kegiatan Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan layanan KB yang dilaksanakan untuk menyediakan operasional pendukung sarana dan prasarana berupa internet di balai KB di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo serta untuk monev anggaran dan pelaksanaan BOKB.

Pendataan keluarga tahun 2022 dilaksanakan pada bulan September – Oktober dengan melibatkan PLKB, kader pendata dan tim PK22 Tingkat Kabupaten. Pendataan Keluarga Tahun 2022 dilaksanakan di 64 desa, 13 Kecamatan dan 95.407.

## **2) Program Pembinaan Keluarga Berencana**

Program Pembinaan Keluarga Berencana tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.5.760.160.900,00 terealisasi sebesar Rp.5.587.579.259,00 atau 97,00 %.

Program pembinaan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain :

### **a. Kegiatan pelaksanaan advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.**

Kegiatan ini pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.142.785.000,- teralisasi sebesar Rp.1.116.627.158,- atau 97.71%.

Sub Kegiatan Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja, dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta dan dukungan seluruh stakeholders dan mitra kerja pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja dilaksanakan dengan kegiatan momentum. Tahun 2022 kegiatan momentum yang dilaksanakan yaitu kegiatan HKG PKK KB-Kes yang dilaksanakan pada bulan Oktober, melibatkan seluruh OPD, TNI, Polri, serta PKK Kabupaten Wonosobo. Kegiatan momentum yang lain seperti TMKK, Bhayangkara KB-Kes belum dapat dilaksanakan karena belum teranggarkan.

Untuk meningkatkan capaian program KKBPK atau program Bangga Kencana dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal dan Sub Kegiatan Promosi dan

KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang.

Sub Kegiatan Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok), dilaksanakan untuk merencanakan Program KKBPK atau program Bangga Kencana di 256 desa dan 15 kecamatan di seluruh Kabupaten Wonosobo.

Sub Kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK, dilaksanakan untuk mendukung operasional dan penyediaan sarana dan prasarana di 15 Balai Penyuluh KB di Kabupaten Wonosobo. Evaluasi dan RTL program KKBPK dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pengendalian program KKBPK berupa distribusi buku feedback program KKBPK dan audit kasus stunting yang dilaksanakan oleh OPD dan 15 Balai PKB.

**b. Kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).**

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.313.220.000,- terealisasi sebesar Rp.1.312.720.000,- atau sebesar 99.96%, terdiri dari sub kegiatan Pembinaan IMP dan KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLK, untuk meningkatkan peran IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam program KKBPK dengan pembinaan di semua lini lapangan oleh PKB/PLKB di 273 PPKBD dan Sub PPKBD di 256 desa di Kabupaten Wonosobo, dan Sub Kegiatan Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dalam bentuk bantuan operasional untuk 2 (dua) kader IMP di setiap desa sebanyak 530 orang kader IMP di semua PPKBD dan Sub PPKBD.

**c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.2.665.905.900,- dan terealisasi Rp.2.553.132.101,- atau sebesar 95.77%

Sub Kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan sejumlah 50 fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, digunakan untuk operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di semua balai penyuluh KB di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran Indikator Kinerja Utama

Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yaitu TFR 2.13 dan LPP 0,40 dengan sasaran PUS unmetneed, PUS Pasca Persalinan dan atau Pasca Keguguran, PUS dengan Pengguna Kontrasepsi Jangka Pendek yang habis masa pakainya. Dilaksanakan di Faskes KB diseluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Dari target sebanyak 4.985 akseptor tercapai 5.087 akseptor melebihi dari target yang ditetapkan.

Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP, memberikan kompensasi kepada 12 akseptor yang mengalami kegagalan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan hamil. Kegagalan yang sering terjadi meliputi kontrasepsi IUD, Implant dan MOP/vasektomi.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana TFR, 2,13, LPP 0,40, MKJP 38.21%, mCPR 78,76%, Unmetneed 10,22%, KB Pria 2,49% dan DO 9,13%. Tahun 2022 dilaksanakan 2 paket pengadaan kendaraan dinas bermotor roda dua untuk antar jemput akseptor dan keluarga stunting dan pengadaan VTP Kit untuk penunjang pelayanan KB Vasektomi, tetapi jumlahnya belum sesuai kebutuhan.

Sub Kegiatan Pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB, dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi bagi peserta KB baru paska pemasangan alat kontrasepsi. Tahun 2022 telah dilaksanakan di Desa Tanjonganom Kepil dengan peserta 45 orang dan Desa Surengede Kejajar yg diikuti oleh 30 peserta pada tanggal 21 Maret dan 22 Maret 2022

Sub Kegiatan Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui pembinaan di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di tingkat Kabupaten Wonosobo sebanyak 4 kali dan pembinaan di Fasilitas Kesehatan dengan melakukan kunjungan ke 30 Faskes sebanyak 3 kali kunjungan

Sub Kegiatan Promosi dan Konseling kesehatan reproduksi, serta hak hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan, dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan provider Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan diikuti 50 peserta dari Faskes dan 50 peserta dari 50 Poktan.

Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca persalinan dan pasca keguguran, dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan kontrasepsi moderen bagi Pasangan Usia Subur dengan melakukan sosialisasi melalui kelas ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan penyuluh KB. Kegiatan dilaksanakan di 5 wilayah Desa dengan cakupan jumlah ibu hamil dan ibu bersalinannya tinggi dan capaian MKJPnya rendah yaitu di Dukuh Boralan Garung, Sedayu Sapuran, Sojokerto Leksono, Kec Wonosobo, dan Desa Winongsari Kaliwiro dan diikuti PUS hamil, PUS unmetneed, pengguna kontrasepsi jangka pendek, PUS Pasca Persalinan Sub Kegiatan Peningkatan Kepesertaan KB Pria, dengan melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan dukungan Motivator KB Pria dalam upaya meningkatkan peserta KB Pria 2,49%. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan Wadaslintang, Sukoharjo, Garung, Sapuran, Wonosobo, Kertek dan Kecamatan Wonosobo sejumlah 200 Pasangan Usia Subur dengan sasaran PUS Pria Calon MOP, Kader KB, Penyuluh Kb, Motivator KB Pria, Tim Provider Vasektomi PKBRS RSUD Setjonegoro

**d. Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organsiasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.638.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 605.100.000,- atau 94.81%. Dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB untuk meningkatkan capaian program KKB PK di 37 kampung KB di Kabupaten Wonosobo melalui pertemuan pokja KP KB desa, kecamatan dan Kabupaten.

**3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.4.064.985.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.531.185.000,00 atau 86,87 %.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Salah satunya dengan pencegahan dan penurunan angka stunting

Sesuai dengan amanat Perban 12 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024, Kabupaten Wonosobo telah

membentuk kader Tim Pendamping Keluarga sejumlah 678 tim yang terdiri dari 2034 kader dengan tugas mendampingi sasaran pendampingan yang terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

e. **Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.980.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.446.480.000,- atau 86.59%.

Dilaksanakan melalui sub kegiatan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB BKR,BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS), untuk menurunkan angka stunting pada desa lokus stunting dengan pengadaan sarana BKB KIT siap nikah dan anti stunting pada 10 poktan PIK remaja. Berupa pengadaan sarana edukasi stunting berupa pengadaan 3 unit kit siap nikah dan 2 unit BKB kit stunting untuk 3 kelompok PIK Remaja di 3 desa stunting sebagai bahan ajar penyiapan kehidupan berkeluarga dan penguatan 1000 hari pertama kehidupan.

Sub kegiatan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB BKR,BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS), yang dilaksanakan dengan pengadaan genre KIT untuk poktan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan UPPKA, pengadaan BKL Kit untuk poktan BKL, Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), pembinaan poktan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan UPPKA, penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS), serta pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

f. **Kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah**

**kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui  
Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.84.705.000,- terealisasi Rp.82.755.000,- atau sebesar 97.7% melalui sub kegiatan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS). Dilaksanakan dengan melakukan pembinaan terhadap 15.118 PUS anggota BKB ber-KB, 7.589 PUS anggota BKR ber-KB, 5.180 PUS anggota BKL ber KB, serta pembinaan terhadap 5.238 PUS anggota UPPKA ber-KB mandiri serta pelaksanaan program PUP dan Genre.

Disamping itu juga dilaksanakan orientasi/pelatihan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kader poktan, BKB, BKL, BKR, UPPKA, PIK R, monitoring evaluasi PIK R dengan melibatkan Forum Genre Kabupaten Wonosobo, pembinaan Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (**Saka Kencana**), pemilihan duta GenRe (Generasi Berencana) sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan edukasi, konseling dan mencegah pernikahan dini, seks pra nikah dan NAPZA. juga dalam mensosialisasikan mengenai stunting kepada masyarakat, peningkatkan pemahaman kespro dan stunting bagi catin, PUS, BKR, BKL, BKB,POKTAN, IMP, kader serta pemberdayaan PIK remaja sebagai mitra kerja dan organsiasi kemasyarakatan dengan penguatan kapasitas dan sosialisasi bahaya stunting mulai dari hulu kepada Kelompok Pik Remaja.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera diarahkan pada pencapaian indikator jumlah kelompok Bina Keluarga, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) 334 kelompok, dengan jumlah anggota 24.816 orang yang ber-KB sebesar 82,17 % dari jumlah PUS anggota kelompok BKB sejumlah 21.839; jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina sebanyak 195 kelompok, dengan jumlah anggota sebanyak 17.176 orang dan yang ber KB sejumlah 74,95 % dari total PUS sejumlah 13.053 PUS, jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang terbentuk dan terbina sejumlah 260 kelompok dengan jumlah anggota 20.100 orang dan kesertaan KB nya sejumlah 54,26 % dibanding jumlah PUS anggota BKL sejumlah 8.654 orang dan kelompok UPPKA terbentuk dan

terbina sejumlah 184 kelompok dengan jumlah anggota 7.476 orang. Adapun prosentase kesertaan KB di kelompok UPPKA ini sejumlah 83,96 % dibanding jumlah PUS 6.028.

**c. Capaian Kinerja Program**

Capaian Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan pada RKPD 2022 dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel III.1.2  
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022  
terhadap RKPD Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022				Target Akhir RPJMD
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>								
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Angka	1.6	1.58 angka	1.24	127.41	T	1.5 angka
2	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun (%)	%	100.00	100%	100%	100	ST	100%
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>								
1	Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15- 49	%	78.76	78.77	75.86	96,31	ST	78.78%
2	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhinya (unmetneed)	%	10.32	10.22 %	9.75	104.60	ST	9.82%
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	38.11	38.21 %	40.56	106.15	ST	38.61%
4	Drop out KB	%	9.56	9.13%	5.12	143.92	ST	7.82%
5	Kepesertaan KB Pria	%	2.53	2.49%	3.00	120.27	ST	2.60%

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022				Target Akhir RPJMD
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
<b>PROGRAM PERBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>								
1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Angka	84.12	84.25 angka	82.17	97.53	ST	85 angka
2	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Angka	82.13	82.66 angka	74.95	90.67	T	84.78 Angka
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Angka	88.95	89.2 angka	54.26	60.83	R	90.2 angka
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun (%)	%	2.52	2.51	2.21	111.95	ST	2.43%
5	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Angka	71.52	71.88 angka	41.14	57.23	R	74.01 angka
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	66.59	58.33 angka	42.16	127.72	ST	46.44 angka
7	Rata-rata usia kawin pertama Wanita	Tahun	18.00	18.2 tahun	19.30	106.04	ST	19 Tahun
8	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Angka	27.55	28 angka	45.28	161.71	ST	30 angka
9	Rata-rata usia melahirkan	Tahun	19.00	19.25 tahun	19,76	102.65	ST	21 tahun

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022				Target Akhir RPJMD
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	pertama perempuan							

Sumber : Aplikasi Gardu Perencanaan Kab. Wonosobo, 2022

#### Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	<b>ST</b>	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	<b>T</b>	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	<b>S</b>	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	<b>R</b>	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	<b>SR</b>	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 16 indikator Kinerja Program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- Realisasi Kinerja Program Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak 12 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori **kategori Tinggi** sebanyak 2 Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori **Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 2 Indikator**

Dari data diatas dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, masih ada indikator rendah yaitu cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB dan cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri.

**d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2021**

Tindak lanjut pelaksanaan program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 atas rekomendasi/Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1.3**  
**Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD**

No .	Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut Tahun 2022
1.	Reformasi pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kebijakan promotive dan preventive terutama dalam penanganan stunting di Kabupaten Wonosobo	Sosialisasi edukasi melalui berbagai media termasuk langsung kepada sasaran oleh PLKB dan kader/TPK
2.	Melakukan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan dini/perkawinan di bawah umur yang akan berakibat pada Kesehatan anak.	Peraturan Bupati Wonosobo tentang strategi penanggulangan perkawinan usia anak mengamatkan semua pihak berperan dalam edukasi sosialisasi.
3.	Tingkat keberlangsungan ber KB dan peningkatan metode MKJP agar lebih diintensifkan dan ditingkatkan sehingga angka drop out lebih ditekan.	Mendekatkan layanan dengan metode safari layanan KB
4.	Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi program stunting secara massif kepada masyarakat	Sosialisasi edukasi melalui berbagai media termasuk langsung kepada sasaran oleh PLKB PPKBD, Sub PPKBD, Kader IMP dan TPK.

### e. Permasalahan dan Solusi

**Tabel III.1.4**  
**Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pengendalian**  
**Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Permasalahan	Solusi
1	Redahnya cakupan kesertaan KB Pasca Persalinan dikarenakan budaya masyarakat setelah melahirkan sampai masa nifas habis ibu jangan ber KB	Edukasi kepada masyarakat bahwa KB Pasca salin tidak mempengaruhi Kesehatan ibu dan anak, justru akan memberikan kenyamanan untuk focus mengasuh anak

## **2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

### **a. Alokasi Pendanaan**

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.884.777.500,00. Anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.708.626.989,00 atau 90,65 %. Capaian program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. III.2.1**  
**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan**  
**Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	993.310.000,00	993.107.190,00	99,98
2	Program Perlindungan Perempuan	134.951.000,00	134.814.920,00	99,9
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	159.441.500,00	158.091.500,00	99,15
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	100
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	125.275.000,00	123.747.800,00	98,78
6	Program Perlindungan Khusus Anak	451.800.000,00	278.865.579,00	61,72
	<b>BELANJA TOTAL</b>	<b>1.884.777.500,00</b>	<b>1.708.626.989,00</b>	<b>93,26</b>

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2022

**b. Program Kegiatan**

**1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *gender* dan peran serta perempuan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program tersebut di tahun 2022, antara lain melalui pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga

pemerintah dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG dan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dengan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG yang dilaksanakan, berupa kegiatan sekolah perempuan, fasilitasi pertemuan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), fasilitasi pertemuan FKKG, penguatan PUG bagi PLKB, penguatan PUG bagi dunia usaha, penguatan PUG dan PPRG bagi kades dan BPD perempuan, penyusunan analisis PPRG bagi pokja PUG, penyusunan modul PPRG desa, dan pembuatan Naskah Akademik (NA) perda PUG.

FKKG merupakan forum komunikasi yang mempunyai peran untuk mengadvokasi pengambil kebijakan agar mendukung program pengarusutamaan *gender*. Fasilitasi pertemuan FKKG yang dilaksanakan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman *gender* dan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Beberapa kegiatan fasilitasi, antara lain rapat koordinasi FKKG dan penguatan kapasitas FKKG di Kabupaten Sleman. Penguatan PUG bagi PLKB merupakan bentuk sinergitas program dan kegiatan di tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa, diharapkan PLKB dapat menjadi sarana penyampai pesan mengenai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara utuh kepada masyarakat. Kegiatan yang diikuti oleh 65 orang PLKB pada tanggal 2 Februari di Harmoni.

Monev PUG dan PPRG bagi dunia usaha dan lembaga masyarakat, melibatkan 30 orang peserta dari dunia usaha dan lembaga masyarakat di wanaboga dengan narasumber Provinsi, pada Juni 2022 Dalam rangka mensinergikan masalah isu *gender* di Kabupaten Wonosobo diharapkan semakin meningkat antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, sebagai penguatan kebijakan PUG juga dilaksanakan Pendampingan penyusunan NA raperda PUG

Monev PUG dan PPRG bagi perangkat daerah termasuk kecamatan di resto Ongklok tanggal 28 September 2022, dengan agenda pendampingan penyusunan PPRG dengan analisis GAP dan PROBA bagi perangkat daerah se kabupaten wonosobo, termasuk kecamatan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten, dilaksanakan Penguatan PUG bagi Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi dilaksanakan rakor rakor tim pokja PUG termasuk Rakor pembentukan Tim Peningkatan ketahanan keluarga daerah atau(TKP2D) diikuti oleh 30 orang peserta, di wanaboga dengan narasumber dari provinsi.

Pembangunan di kabupaten wonosobo telah memperhatikan perencanaan responsif gender, salah satunya adalah dalam pembangunan hibah jalan daerah, dinas PPKBPPPA ikut mensosialisasikannya, melalui sosialisasi PUG PPRG isu GESI, infrastruktur responsif gender, selain itu juga melaksanakan kegiatan konsultasi publik dengan pengampu kepentingan masyarakat penyandang disabilitas, monev aplikasi design infrastruktur responsif gender, peningkatan kapasitas tentang prinsip infrastruktur responsif gender,

Pada kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi dilaksanakan monitoring PPEP di desa perikesit kejajar, pendampingan PPEP bagi Perempuan kepala keluarga (PEKA), pendampingan PPEP desa Tanjunganom, pendataan pelaku industri rumahan (IR) rakor hasil pemetaan pelaku IR, rakor Tim Enumerator, rakor TIM pelaksana IR tingkat desa, rakor Tim pelaksana IR tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi dan pendataan pelaku IR.

Kegiatan selanjutnya adalah, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, melalui rapat koordinasi jaringan perempuan usaha kecil (JARPUK) antara perangkat daerah terkait, kecamatan dan Jarpuk, berupa rapat koordinasi tentang penguatan Jarpuk, pembentukan Jarpuk kelas bisnis bagi perempuan kecamatan Leksono dan kecamatan Wonosobo dan pelatihan JARPUK menegemen keuangan dan halal di pendopo kabupaten wonosobo, sekaligus pelantikan pengurus JARPUK 2022-2027; dan fasilitasi pertemuan Jarpuk bagi perempuan usaha kecil kabupaten berupa rapat rutin.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan istri Forkopimda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui penguatan GOW.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Periswara. Kegiatan ini ditujukan agar peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan organisasi wanita dapat meningkat.

Kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui peringatan Hari Anak Nasional sebagai kampanye tentang pemenuhan hak anak, dan lomba video dalam rangka Hari Anak Nasional sebagai kampanye tentang pencegahan perkawinan usia anak.

Dari alokasi anggaran program pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 993.310.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 993.107.190.190,00 atau 99,98%..

## **2) Program Perlindungan Perempuan**

Program perlindungan perempuan dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi, dengan menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dan melakukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong pemerintah untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Beberapa upaya tersebut diantaranya, bedah kasus kekerasan, penjangkauan kasus ke jongsari leksono, penguatan PPT tingkat kabupaten, evaluasi SOP layanan terpadu, rapat koordinasi PPT, PUSPAGA, UPPPA POLRES, perangkat daerah terkait seperti DINSOSPMD, perangkat desa, TP PKK, pemerhati anak, toga, toma, masyarakat desa, organisasi, serta Lembaga terkait lainnya.

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, penanganan kasus korban kekerasan dapat ditangani mulai di tingkat desa, upaya pencegahan, permasalahan dan upaya penanganan korban juga dapat diperkuat di tingkat desa, melalui pemahaman yang baik oleh masyarakat dan pihak

terkait lainnya, dan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan yang semakin baik pula, sehingga banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dapat diminimalisir.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengoptimalkan penanganan dan pendampingan korban kekerasan bagi perempuan dan anak, maka pemerintah juga melaksanakan fasilitasi operasional *shelter*, pendampingan korban, melalui Dinas PPKBPPPA dengan melibatkan masyarakat, korban, dan UPIPA. Adapun alokasi anggaran program perlindungan perempuan sebesar Rp 134.951.000,00, dan dapat terealisasi sebesar Rp 134.814.920,00 atau 99,90%.

### **3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program pengelolaan sistem data gender dan anak diarahkan pada pengembangan SIGA. Ketersediaan data yang akurat *by system* menjadi pondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan dalam pembangunan, terutama terkait *gender* dan anak. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data *gender* dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah melalui penyajian pemanfaatan data *gender* dan anak dalam kelembagaan data. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data pilah *gender* dan anak sebagai data dasar dalam pembangunan. Pengumpulan data, *desk*, penyajian, dan sosialisasi data pilah dan data sistem informasi *gender* dan anak dilaksanakan oleh tim data dan tokoh perempuan Kabupaten Wonosobo.

Dari alokasi anggaran program pengelolaan sistem data *gender* dan anak sebesar Rp 20.000.000,00, dapat terealisasi 100 %.

### **4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program peningkatan kualitas keluarga diarahkan pada optimalisasi pemenuhan hak serta pelaksanaan fungsi keluarga demi terwujudnya keluarga yang semakin berkualitas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program peningkatan kualitas keluarga antara lain, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan *gender* (KG) dan hak anak tingkat daerah melalui advokasi kegiatan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak, serta penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan

Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah dan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah.

Advokasi kegiatan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak dilaksanakan untuk memberikan penguatan kebijakan pemerintah kabupaten yaitu dengan Menyusun Naskah Akademik Kabupaten Layak Anak, selain itu untuk mengkoordinasikan Lembaga layanan yang telah diada di tingkat desa seperti BASKOM PATMBM, BK TKI dan GSIB.

Disamping itu juga dilaksanakan pembentukan PATBM di desa Kwadungan kalikajar dan Desa Siwuran Kecamatan garung

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah, dilaksanakan melalui peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu, sebagai kampanye tentang kesetaraan *gender* dalam pembangunan.

Adapun kegiatan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah, dilaksanakan melalui fasilitasi layanan PUSPAGA, peningkatan kapasitas Pemberi layanan PUSPAGA dan rakor rakor serta evaluasi layanan PUSPAGA. Lembaga pemerintah berupaya untuk berkomitmen dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan anak. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan semaksimal mungkin, melalui pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan yang telah diupayakan oleh pemerintah, terutama mencegah perkawinan usia anak.

Dari alokasi anggaran program peningkatan kualitas keluarga sebesar Rp 159.441.500,00, dapat terealisasi sebesar Rp 158.091.500,00 atau 100%.

##### **5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program pemenuhan hak anak dilaksanakan antara lain melalui kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, dengan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA.

Kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha ditujukan untuk mendorong pemenuhan hak

dan perlindungan anak melalui peningkatan partisipasi anak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, fasilitasi evaluasi KLA melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak; fasilitasi *capacity building* FORKOS oleh tenaga ahli tingkat provinsi; rapat koordinasi forum anak sebagai fasilitasi pemenuhan hak anak; rapat koordinasi gugus tugas KLA dengan pembahasan mewujudkan Kabupaten Wonosobo menjadi Kabupaten Layak Anak; untuk meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan dan komitmen bahwa Forum Anak (FA) sebagai indikator KLA; dan deklarasi sekolah ramah anak melalui penandatanganan deklarasi bersama mengenai sekolah ramah anak di Kemenag Wonosobo.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA dilaksanakan sebagai upaya percepatan terwujudnya KLA dan GN-OTA. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah, pelatihan KHA dan disiplin positif bagi 50 orang guru SD dan SMP sebagai upaya pemenuhan hak anak di sekolah; penguatan SRA, workshop anak dalam rangka mendorong partisipasi anak pada program pelopor dan pelapor; Rakor SRA dengan perangkat daerah untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak; penyaluran bantuan GN-OTA; rapat pengurus GN-OTA; dan sosialisasi program GN-OTA kepada masyarakat dan dunia usaha.

Dari alokasi anggaran program pemenuhan hak anak sebesar Rp 125.275.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp 123.747.800,00 atau 98,78%.

## **6) Program Perlindungan Khusus Anak**

Program perlindungan khusus anak dilaksanakan melalui, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, dengan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, serta melalui kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah, dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi pencegahan TPPO dilaksanakan oleh Kita *Institute*, Pelaksanaan kegiatan ditujukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan berbasis gendr dan anak termasuk TPPO termasuk pencegahan perkawinan usia anak, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Adapun kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan kasus korban kekerasan. Realisasi anggaran yang bersumber dari DAK ini hanya 34,01%, dikarenakan penggunaan anggaran penyediaan layanan menyesuaikan petunjuk pemerintah pusat dan termasuk menyediakan biaya pelayanan korban meninggal outopsi termasuk saksi ahli dll, sedangkan di kabupaten wonosobo layanan yang teralisasi sesuai kebutuhan adalah layanan psikolog dan layanan pendampingan.

Pada kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota digunakan untuk penguatan komitmen pengambil kebijakan yaitu Forum komunikasi pimpinan daerah dengan menghadirkan narasumber dari pemerhati perempuan anak Kementerian PPPA dan menghasilkan kesepakatan pembentukan UPTD PPA di kabupaten wonosobo demi memberikan layanan yang komprehensif bagi korban kekerasan berbasis gender

Kompleksitas permasalahan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo, membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Dari alokasi anggaran program perlindungan khusus anak sebesar Rp 451.800.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp 278.865.579,00 atau 61,72%.

### c. Capaian Kinerja

**Tabel III.2.2**

**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator RKPD 2022**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022				Target RPJ MD 2026
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	45,74	40	47,57	103.19	<b>ST</b>	47.5
2	Persentase keterwakilan perempuan dalam	%	4,44	4,44	4,44	100	<b>ST</b>	6.66

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022				Target RPJ MD 2026
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	parlemen							
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58	58.06	96,53	166,26	<b>ST</b>	59.75
4	Persentase anggaran responsif <i>gender</i>	%	72.37	81.58	58.96	72.27	<b>S</b>	100
5	Persentase APBDes Responsif <i>gender</i>	%	36.88	40.96	49.88	121	<b>ST</b>	59.67
6	Persentase SDM pengelola layanan perlindungan perempuan dan anak terlatih	%	4	16	18.94	118.38	<b>ST</b>	64%
7	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100	100	100	100	<b>ST</b>	100
8	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	40	45	49.09	109.09	<b>ST</b>	65
9	Cakupan layanan konseling	%	0.13	0.15	0.29	193.33	<b>ST</b>	0.23
10	Cakupan lembaga layanan tingkat desa	%	31.70	32.83	32.45	98,84	<b>ST</b>	37.74
11	Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam system	%	90	95	97.15	102.26	<b>ST</b>	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022				Target RPJ MD 2026
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	informasi terupdate							
12	Persentase desa ramah anak	%	19,14	23.51	30,57	130.03	<b>ST</b>	100
13	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	100	100	100	<b>ST</b>	100
14	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	40	45	50	111	<b>ST</b>	65

**Keterangan Status Capaian:**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	<b>ST</b>	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	<b>T</b>	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	<b>S</b>	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	<b>R</b>	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	<b>SR</b>	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 14 Indikator Kinerja Program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Realisasi Kinerja Program Kategori **Sangat Tinggi** sebanyak **13** indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori kategori **sedang** sebanyak **1** Indikator.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Rendah dan Sangat Rendah sebanyak Indikator.

Dari data di atas, secara umum capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah mencapai target RPJMD.

Capaian realisasi anggaran terendah adalah pada program perlindungan khusus anak, hal tersebut salah satunya dikarenakan masih banyak korban kekerasan di Wonosobo belum mau melapor, sedangkan pendampingan yang dilaksanakan dapat dilakukan hanya bagi korban yang sudah melapor ke polisi, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Ketersediaan UPT PPA serta petugas khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut merupakan wujud komitmen hadirnya pemerintah secara penuh dalam pendampingan korban kekerasan. Saat ini unit pelayanan yang telah terbentuk adalah PUSPAGA yang baru merupakan layanan konsultasi keluarga. PUSPAGA memiliki visi memberikan penguatan keluarga (melalui konseling dan pendataan) baik bagi pasangan calon pengantin (catin) maupun bagi pasangan yang telah berkeluarga yang mengalami masalah keluarga, bukan menangani kasus. Penanganan kasus selama ini dilaksanakan oleh PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang terdiri dari Polres, UPIPA, RSUD, dan perangkat daerah terkait, belum ada unit serta petugas khusus pada Bidang PPPA Dinas PPKBPPPA dapat melayani, sehingga bila ada kasus diserahkan kepada UPIPA, peranan masih di tingkat koordinasi/sebatas mengkoordinir.

Dari data diatas secara umum capaian indicator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah mencapai targe6t RPJMD 2022, sedangkan realisasi persentase anggaran responsive gender masih dalam kategori sedang

dikarenakan belum semua perangkat daerah Menyusun Analisis Problem Base Aproach (PROBA) dan Gender Budget Statmen (GBS) sebagai analisis dalam perencanaan program dan kegiatan

**d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD**

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo agar melakukan optimalisasi kinerja unit pelayanan melalui petugas khusus pelayanan perlindungan perempuan dan dan anak, tanggapan kami bahwa penanganan korban berbasis gender dan anak memang membutuhkan SDM sesuai dengan kebutuhan masyarakat/korban, maka dari itu dinas mengusulkan dan telah Menyusun kajian akademis terkait dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, arah kebijakan pembangunan daerah Nomor 9 huruf f membentuk dan menguatkan **Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)** sebagai penyedia layanan perlindungan.

Selain itu agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam mensosialisasikan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen sudah melalui berbagai kegiatan penguatan Pendidikan politik perempuan, namun belum membuahkan hasil, hal ini perlu dukungan semua pihak.

**e. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilakukan antara lain:

**Tabel III.2.3**

**Matriks Permasalahan dan Solusi  
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>No.</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>
1.	Masih terbatasnya Lembaga layanan aktif desa serta tenaga yang berkompeten, yang menangani dan memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.	Melakukan pemetaan kebutuhan, pembentukan kelompok, serta memfasilitasi pelatihan kepada Lembaga dan petugas layanan, dalam memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong adanya layanan yang berbasis masyarakat.
2.	Masih terbatasnya pemenuhan hak perempuan dan anak, dalam hal fasilitasi sarana prasarana maupun partisipasinya dalam berbagai bidang pembangunan	Mendorong pemenuhan fasilitasi sarana prasarana dan layanan perlindungan berbasis masyarakat untuk perempuan dan anak, pemenuhan hak perempuan dan anak, dan partisipasi perempuan dan anak dalam musrenbang, serta proses pembangunan lainnya
3.	Masih terbatasnya pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Wonosobo sebagai Kabupaten Layak Anak	Mendorong seluruh desa dan kelurahan menjadi desa/kelurahan layak anak
4.	Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mendorong terbentuknya unit pelayanan serta petugas khusus pelayanan perlindungan perempuan dan anak

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis 2021-2026 (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Program) dan Tugas Pokok dan Fungsi, kepada semua masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan Nasional selama Tahun 2022 Beberapa indikator kinerja belum mencapai target. Namun demikian relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja 2021. Beberapa indikator kinerja tidak mencapai target sehingga memerlukan intervensi yang tepat dan kerjasama semua pihak sehingga sasaran dapat tercapai. Dengan penekanan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan seperti tersebut di atas diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan visi dan misi Daerah Kabupaten Wonosobo

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOSOBO



**DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP**

**NIP. 19780419 199703 2 001**